

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan kota megapolitan yang sibuk dan berkembang cepat, dalam satu hari menghasilkan timbulan sampah sebesar +- 6.139,33 ton (Sumber: Informasi Kebersihan Tahun 2010). Dengan jumlah penduduk yang beraktifitas di Jakarta terus bertambah disertai dengan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan konsekuensi bertambahnya volume sampah dan kontribusi beragamnya jenis sampah seperti sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selain itu, sebagian besar masyarakat Jakarta masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Sehingga masyarakat dalam menangani sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Kesadaran dan perilaku warga Jakarta untuk membuang sampah pada tempat sampah dan menjaga kebersihan dan keindahan kotanya belum sepenuhnya terlihat terbentuk dari tiap kepribadian warganya baik penduduk tetap maupun penduduk pendatang atau komuter. Dilain pihak, ketersediaan lahan yang semakin sulit dan terbatas serta pengelolaan sampah belum sesuai dengan metoda dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Keadaan ini mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mencari solusi pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan.

Dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, paradigma pola pengelolaan sampah diharapkan tidak lagi mengandalkan pola kumpul angkut buang namun beralih ke pola pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumber.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Master Plan Persampahan yang disusun pada tahun 1987 untuk periode 1987 - 2005 dan telah melakukan review terhadap Master Plan 1987 pada tahun 2005 yang dikenal sebagai Review Master Plan persampahan tahun 2005 untuk periode 2005 - 2015. Untuk mengakomodir perubahan-perubahan seperti kondisi Kota Jakarta saat ini dan menjalankan amanat Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030, maka perlu dilakukan penyusunan Master Plan dan Kajian Akademik Persampahan Provinsi DKI Jakarta sebagai acuan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta untuk masa 2012 - 2032.

## 1.2. Maksud Dan Tujuan

Pekerjaan “Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012 -2032” dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk melanjutkan pelaksanaan pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan dilaksanakannya pekerjaan “Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan persampahan di Provinsi DKI Jakarta yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan pelayanan kebersihan di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan, standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

## 1.3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah

1. Tersusunnya dokumen Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012 - 2032.
2. Terlaksananya pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Master Plan dan Kajian Akademis yang disusun.

## 1.4. Hasil Yang Diharapkan

Tersedianya dokumen Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta. untuk mendukung upaya penanggulangan masalah persampahan di DKI Jakarta secara terpadu melalui sistem penanganan yang lebih up to date dan efisien, serta tidak rentan terhadap kelumpuhan sistem, mengaplikasikan sistem secara terintegrasi, dukungan publik dan penggunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.

## 1.5. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan rujukannya, yaitu :

1. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. UU No. 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Peraturan Gubernur No. 131 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.

#### 1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan “Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta”, antara lain sebagai berikut:

## 1. Identifikasi Kondisi Pengelolaan Persampahan di Provinsi DKI Jakarta

Hal ini untuk melihat kembali kondisi faktual yang sekarang berjalan dalam hal pengelolaan persampahan di Provinsi DKI Jakarta dari berbagai Aspek antara lain:

- Aspek Regulasi;
- Aspek Kelembagaan;
- Aspek Pendanaan;
- Aspek Partisipasi Masyarakat / Sosial Budaya;
- Aspek Teknis dan Operasional.

## 2. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Provinsi DKI Jakarta

Pada lingkup ini diharapkan konsultan dapat menginventarisasi sarana dan prasarana eksisting yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, baik dari tahapan di Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, masyarakat, swasta dan instansi lain;

3. Membuat dan memetakan pola penanganan eksisting berikut ketersediaan sarana dan prasarana di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan seribu, dengan melihat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta;
4. Melakukan identifikasi dan analisa timbulan sesuai dengan daerah pelayanan pengolahan sampah di DKI Jakarta serta menganalisa komposisi dan karakteristik sampah dengan mengacu kepada studi komposisi dan karakteristik sampah di DKI Jakarta;
5. Menganalisa hasil kajian pada point 4 serta memanfaatkan data sekunder dari hasil Master Plan JICA 1987, Master Plan Review and Program Development (WJEMP DKI 3 - 11) ditambah dengan data - data terakhir dari studi -studi instansi lain terkait termasuk informasi dari Dinas Kebersihan;

6. Menyusun Standar Pelayanan Pemilahan dan Pengumpulan Sampah.  
Konsultan diharapkan dapat merekomendasikan kriteria dan standar pelayanan pemilahan dan pengumpulan sampah termasuk konsep disain dari modifikasi / perbaikan disain tempat pemilahan sampah, dan sarana pengumpul sampah yang memasukan konsep pemilahan sampah secara praktis mulai dari sumber;
7. Menyusun sistem pelayanan pengangkutan dari sumber dan atau tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
8. Mengkaji kebutuhan tempat pemrosesan akhir sampah yang berbasis Teknologi Tinggi ramah lingkungan;
9. Membuat rekomendasi teknis pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional berbasis Teknologi Tinggi Ramah Lingkungan.
10. Mengkaji aspek kelembagaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari pengelolaan persampahan;
11. Mengkaji aspek regulasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari pengelolaan persampahan;
12. Mengkaji aspek pendanaan yang meliputi perkiraan biaya kegiatan pengelolaan sampah jangka pendek (tahunan), jangka menengah (lima tahunan) dan jangka panjang, termasuk juga perhitungan besaran tipping fee pengolahan sampah;
13. Mengkaji aspek peran serta masyarakat dan sosial budaya sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
14. Menyusun Naskah Akademis Persampahan DKI Jakarta Kajian akademis ini dituangkan menjadi Naskah Akademis yang berisikan;
  - a. Kajian aspek kelembagaan yang akan diterapkan dalam pengelolaan sampah berteknologi tinggi,

- b. Kajian aspek hukum perlunya penyusunan Master Plan yang baru, Master Plan & Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta
  - c. Kajian aspek pendanaan dan investasi untuk setiap tahapan pembangunan yang akan direncanakan,
  - d. Kajian akademis alternatif pemilihan teknologi pengolahan sampah dengan mempertimbangkan aspek wawasan lingkungan,
  - e. Kajian aspek keterlibatan dan bentuk peran serta masyarakat dan stakeholder serta pemerintah dalam konteks setiap tahapan pembangunan, termasuk dalam hal ini mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam Master Plan.
15. Membuat skala prioritas program pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta, cakupan terakhir dari kegiatan ini adalah membuat usulan program secara berkesinambungan, dengan menggunakan skala prioritas untuk masing - masing unit yang ada di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, berikut tahapan pelaksanaan program tersebut;
16. Melaksanakan workshop sebanyak dua kali, yaitu workshop pertama dilakukan pada bulan ketiga sebelum penyampaian laporan antara dan workshop kedua dilakukan setelah penyampaian konsep laporan akhir.

## 1.7. Sistematika Pelaporan

Laporan Antara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. Bab 1 Pendahuluan

Sebagian besar materi Bab 1 mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK). Bab ini berisikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Hasil Yang Diharapkan, Landasan Hukum, Ruang Lingkup Pekerjaan serta Sistematika Laporan.

## 2. Bab 2 Tinjauan Terhadap Master Plan Terdahulu

Pada Bab 2 akan meninjau secara ringkas mengenai Master Plan Persampahan DKI Jakarta 1987 periode tahun rencana induk 1987 - 2005, Review Master Plan 2005 periode tahun rencana induk 2005 - 2015 dan SAPROF Proyek Penyelenggaraan Sampah Jakarta Indonesia 2008. Pada bab ini mengulas inti dan membandingkan kajian tentang timbulan, komposisi dan karakteristik sampah serta konsepsi dan tahap pelaksanaan program dari kedua Master Plan Persampahan terdahulu sebagai pembelajaran keberhasilan mengarahkan pengelolaan sampah dan landasan penyusunan Konsep Master Plan Persampahan DKI Jakarta tahun periode 2012 - 2032.

## 3. Bab 3 Gambaran Umum / Profil Provinsi DKI Jakarta

Bab 3 mengulas gambaran Umum atau Profil DKI Jakarta sebagai daerah studi. Pokok-pokok bahasan gambaran umum DKI Jakarta antara lain: Kondisi Fisik yang meliputi topografi, geologi, geografi dan iklim; Batas Administrasi dan Demografi / Kependudukan serta pergerakan penduduk komuter perkotaan; arah Perkembangan Kota berupa Rencana Tata Ruang dan Tata Guna Lahan dan Trend Perkembangan Sarana & Prasarana yang meliputi prasarana jalan, transportasi, air minum, air limbah dan drainase di DKI Jakarta 20 tahun mendatang.

## 4. Bab 4 Pengumpulan dan Analisis Data

Adapun di Bab 4 menjabarkan antara lain mengenai: metoda pengumpulan data seperti penentuan wilayah survey, jumlah sampel dan penyusunan kuestioner & checklist; pelaksanaan pengumpulan data seperti penentuan detail daerah survey, pra survey, uji coba kuestioner & checklist dan pembagian surveyor dan wilayah kerja; pengolahan dan analisis data; dan permasalahan pokok yang didapat dari pengumpulan data.

5. Bab 5 Kondisi Sistem Pengelolaan Persampahan Eksisting DKI Jakarta Pada Bab 5 ini akan menguraikan mengenai kondisi sistem pengelolaan persampahan eksisting yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011. Uraian Bab ini meliputi strategi dan kebijakan pengelolaan sampah kota; timbulan, komposisi dan karakteristik sampah kota; dan 5 (lima) aspek pada sistem pengelolaan sampah.

## 6. Bab 6 Konsep Garis Besar Sistem Pengelolaan Sampah DKI 2012 - 2032

Sebagai Bab penutup, di Bab 6 akan mengulas mengenai konsep Garis Besar Sistem Pengelolaan Sampah DKI Jakarta 2012 - 2032 yang antara lain berisikan mengenai: landasan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman dan kriteria Pengelolaan Sampah;

pendekatan dan strategi; skenario dan tahapan program pengelolaan sampah; dan rancangan pengembangan sistem pengelolaan sampah DKI. Bagian ini akan menjadi bahan pokok bahasan pada Workshop I dan draft rancangan Master Plan Sistem Pengelolaan Sampah DKI Jakarta 2012 - 2032.